



Peran Pancasila Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Raffi candra^{1*}, Winda fahira², Haris Hardi alim³, Reza Pahlevi⁴, Najhan Anugrah⁵, Andhika Ramadhan⁶, Jenny Fadila nawawi⁷

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}Universitas Muhammdiyah Riau

*Email: 230401373@gmail.com

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Artikel ini mengkaji peran Pancasila dalam membangun masyarakat yang adil melalui analisis nilai-nilai Pancasila, tantangan penerapannya, serta sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kajian dilakukan dengan metode studi literatur dari berbagai sumber akademik, seperti Google Scholar, ResearchGate, dan Semantic Scholar. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, menuntut pemerataan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, seperti kesenjangan sosial, polarisasi masyarakat, dan kebijakan yang kurang konsisten. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, didukung oleh pendidikan yang berkesinambungan dan penguatan komitmen bersama terhadap nilai-nilai Pancasila. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan sosial tidak hanya menjadi slogan, tetapi terwujud dalam kebijakan nyata dan perilaku sehari-hari.

Kata kunci: Pancasila, keadilan sosial, konsistensi, sinergi, masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, dan bahasa, dihadapkan pada tantangan besar dalam mewujudkan persatuan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya (Aminullah, 2023). Pancasila, yang dijadikan dasar negara, bukan hanya sebuah simbol formal atau sekadar pedoman hukum, tetapi juga merupakan falsafah hidup yang mengandung nilai-nilai luhur untuk mengarahkan perjalanan bangsa. Salah satu nilai paling mendasar yang terkandung dalam Pancasila adalah prinsip keadilan sosial, yang tercermin dalam sila kelima: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Nilai ini menegaskan bahwa negara harus berperan aktif dalam memastikan tercapainya

kesejahteraan dan kesetaraan di semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Pancasila sebagai dasar negara memberikan arahan yang sangat jelas mengenai keadilan sosial, yang tidak hanya terbatas pada pengaturan hak-hak individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mencakup pemerataan akses terhadap berbagai sumber daya dan kesempatan. Hal ini meliputi pemerataan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja. Keberadaan keadilan sosial dalam Pancasila menyiratkan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, latar belakang ekonomi, maupun posisi geografis, berhak mendapatkan perlakuan yang setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Anggriani, 2017). Keadilan sosial juga berarti bahwa

negara harus hadir untuk melindungi hak-hak setiap individu dan memastikan tidak ada pihak yang terpinggirkan atau tertinggal dalam proses pembangunan.

Namun, dalam kenyataannya, keadilan sosial di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang perlu dihadapi. Walaupun Indonesia kaya akan sumber daya alam dan memiliki potensi besar untuk berkembang, kesenjangan sosial dan ekonomi masih sangat nyata (Makmur et al., 2024). Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, perbedaan pendapatan yang mencolok, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi sebagian besar masyarakat, menjadi bukti bahwa masih banyak yang harus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial dalam Pancasila. Bukan hanya itu, globalisasi yang semakin berkembang, meskipun membawa kemajuan, juga membawa tantangan baru berupa pengaruh budaya asing yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan beberapa platform untuk mengakses dan mengumpulkan literatur ilmiah yang relevan, yaitu Google Scholar, ResearchGate, Science Open, CORE, dan Semantic Scholar. Google Scholar digunakan sebagai mesin pencari utama untuk menemukan artikel, buku, dan tesis yang membahas topik terkait Pancasila dan keadilan sosial. ResearchGate memungkinkan peneliti untuk mengakses publikasi dari para peneliti di bidang ilmu sosial dan politik serta berinteraksi langsung dengan mereka. Science Open menyediakan akses ke berbagai jurnal dan artikel yang relevan, baik yang telah dipublikasikan maupun yang sedang dalam tahap review, sementara Semantic Scholar menawarkan fitur canggih dalam pencarian artikel ilmiah, memprioritaskan makalah yang paling berpengaruh dan

terkini. Penggunaan berbagai platform ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif dan mendalam mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki nilai-nilai yang sangat relevan dalam mencapai tujuan keadilan sosial. Sila kelima Pancasila, yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana negara seharusnya bertindak untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan bagi seluruh rakyatnya. Dalam pembahasan ini, akan dibahas secara mendalam mengenai peran Pancasila dalam mewujudkan keadilan sosial, tantangan yang dihadapi, serta upaya yang telah dilakukan dalam mencapai cita-cita tersebut.

1. Nilai-Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memuat nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bagi bangsa dalam mencapai tujuan bernegara (Annisa & Najicha, 2021), salah satunya adalah mewujudkan keadilan sosial. Sila kelima dari Pancasila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" mencerminkan tekad negara untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, mendapatkan hak yang setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, nilai keadilan sosial dalam Pancasila tidak hanya sebatas pada pemerataan materi atau kekayaan, tetapi juga mencakup aspek hak asasi manusia, kesetaraan kesempatan, dan perlakuan adil bagi setiap warga negara.

a. Keadilan Ekonomi

Salah satu nilai utama dari keadilan sosial dalam Pancasila adalah pemerataan ekonomi. Sila kelima mengarahkan agar kekayaan dan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dikelola untuk

kepentingan rakyat, khususnya mereka yang paling membutuhkan. Keadilan ekonomi ini berusaha untuk mengurangi jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin dengan menciptakan peluang yang setara bagi setiap warga

negara dalam bidang ekonomi. Dalam penerapannya, ini dapat berarti pemberian akses yang sama terhadap pekerjaan yang layak, distribusi kekayaan yang lebih merata, serta kebijakan fiskal yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

b. Keadilan Sosial dalam Akses Pendidikan

Selain aspek ekonomi, keadilan sosial dalam Pancasila juga mencakup bidang pendidikan. Sila kelima Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan setara, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau asal daerah mereka. Pendidikan yang merata akan membuka peluang bagi setiap individu untuk memperbaiki kualitas hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa (Maula et al., 2023). Oleh karena itu, pemerataan akses pendidikan, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan sosial.

c. Keadilan Sosial dalam Layanan Kesehatan

Keadilan sosial dalam bidang kesehatan juga menjadi bagian penting dari sila kelima Pancasila. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi akses kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan (Agasi, 2023; Subroto & Ferdinan, 2024). Keadilan sosial dalam kesehatan tidak hanya berarti akses terhadap layanan

medis, tetapi juga mencakup upaya preventif dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hidup sehat

Dengan demikian, nilai keadilan sosial dalam Pancasila mengandung berbagai dimensi yang melibatkan pemerataan hak dan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila mengajarkan bahwa keadilan sosial bukan hanya tentang pembagian yang adil, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang memungkinkan setiap individu untuk berkembang dan hidup sejahtera dalam masyarakat yang penuh kedamaian dan kesetaraan.

2. Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Mewujudkan keadilan sosial di Indonesia, meskipun merupakan cita-cita yang jelas dan tegas dalam Pancasila, tidaklah mudah. Berbagai tantangan yang muncul baik dari faktor internal maupun eksternal dapat menghambat proses tercapainya keadilan sosial yang sejati. Tantangan-tantangan ini, yang berasal dari ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga isu sosial-politik, perlu diatasi secara sistematis dan berkelanjutan agar tujuan tersebut dapat tercapai.

a. Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Sosial

Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi yang masih sangat besar, baik antara golongan kaya dan miskin maupun antara daerah perkotaan dan pedesaan. Meskipun Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan sosial tetap menjadi masalah yang mencolok. Daerah-daerah tertentu, terutama di luar

pulau Jawa, masih mengalami kemiskinan yang mendalam, dengan

tingkat pengangguran yang tinggi dan akses terbatas terhadap pendidikan serta layanan kesehatan (Warsilah, 2015).

Kesenjangan ini juga diperburuk oleh ketidakmerataan distribusi sumber daya alam dan hasil pembangunan yang tidak selalu menguntungkan seluruh lapisan masyarakat (Syahza, 2012). Kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada kawasan perkotaan seringkali mengesampingkan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah pedesaan, yang mengakibatkan terbentuknya pola ketimpangan yang semakin lebar. Hal ini menyulitkan tercapainya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Akses Terbatas terhadap Pendidikan dan Kesehatan

Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyediakan pendidikan gratis dan layanan kesehatan melalui program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), masih banyak daerah yang memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terbatas. Keterbatasan ini sering kali mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas layanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan.

3. Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Berbagai kebijakan dan program telah diimplementasikan dengan tujuan untuk memperbaiki ketimpangan sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan dasar. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, upaya pemerintah

dalam mewujudkan keadilan sosial terus dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

a. Program Kesejahteraan Sosial

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial adalah dengan melaksanakan berbagai program kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk membantu

masyarakat yang kurang mampu. Program-program ini dirancang untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa contoh program kesejahteraan sosial yang telah diimplementasikan pemerintah antara lain:

- Program Keluarga Harapan (PKH): PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Luthfi, 2019). Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang memenuhi syarat, dengan tujuan untuk meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi.

b. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Selain program kesejahteraan sosial, pemerintah Indonesia juga fokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu bentuk ketimpangan sosial yang paling jelas terlihat adalah ketidakmerataan akses terhadap infrastruktur yang layak, terutama di daerah pedesaan dan kawasan timur Indonesia (Fajar, 2021). Pemerintah berupaya membangun infrastruktur yang merata di seluruh wilayah untuk mendukung pemerataan ekonomi, meningkatkan aksesibilitas, dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi daerah-daerah tertinggal untuk berkembang.

Pembangunan infrastruktur yang mencakup transportasi, energi, dan komunikasi menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pemerataan. Proyek pembangunan jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara baru di daerah-daerah terpencil bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung sektor ekonomi, tetapi juga memfasilitasi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

c. Reformasi Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan area penting dalam upaya menciptakan keadilan sosial (Khoirudin, 2024). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal.

Salah satu kebijakan yang mendukung keadilan sosial dalam pendidikan adalah Wajib Belajar 12 Tahun, yang memungkinkan anak-anak Indonesia dari keluarga kurang mampu untuk menyelesaikan pendidikan dasar hingga pendidikan menengah tanpa harus memikirkan biaya. Selain itu, melalui program KIP, anak-anak dari keluarga miskin dapat menerima bantuan untuk melanjutkan pendidikan mereka hingga perguruan tinggi (Dimmera & Purnasari, 2020).

4. Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Masyarakat memiliki peran yang sangat fundamental dalam mewujudkan keadilan sosial. Sebagai bagian integral dari negara, masyarakat bukan hanya berfungsi sebagai penerima manfaat dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga sebagai agen yang berkontribusi dalam menciptakan dan memastikan nilai-nilai

keadilan sosial dapat hidup dan berkembang di masyarakat (Samsul, 2024). Keberhasilan pencapaian keadilan sosial yang seutuhnya sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan.

Pentingnya peran masyarakat dalam keadilan sosial tidak hanya terkait dengan pemberdayaan ekonomi, tetapi juga dengan bagaimana masyarakat berkolaborasi dalam mengatasi ketimpangan sosial. Dalam hal ini, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kebijakan yang ada, menyuarakan aspirasi kelompok yang terpinggirkan, serta memastikan agar semua warga negara mendapatkan hak-haknya secara adil (Hasim et al., 2019). Salah satu aspek mendasar dalam peran masyarakat adalah menjaga kesadaran sosial untuk menghargai hak-hak sesama, terutama yang tidak mampu atau berada dalam posisi sosial yang lemah.

Secara tradisional, budaya gotong royong di Indonesia sudah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat, yang merupakan bentuk konkret solidaritas sosial. Namun, peran ini tidak hanya terbatas pada semangat kebersamaan dalam kegiatan sehari-hari, melainkan harus diperluas dalam hal pemberdayaan dan advokasi hak-hak sosial. Salah satu peran besar masyarakat adalah meningkatkan kepedulian terhadap masalah ketimpangan yang ada, baik dalam hal akses pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi (Roziqin et al., 2019). Dengan ini, masyarakat dapat menjadi kekuatan yang memperjuangkan perubahan menuju sistem sosial yang lebih adil.

Di sisi lain, masyarakat juga harus menjadi agen kontrol sosial yang aktif, memantau kebijakan pemerintah dan sektor swasta agar tetap berpihak pada kesejahteraan bersama,

bukan hanya pada kepentingan sekelompok individu atau golongan tertentu. Mengingat tantangan ketidakadilan sosial yang ada, partisipasi aktif masyarakat dalam menuntut

kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas dari semua sektor sangatlah diperlukan. Tidak kalah penting, masyarakat juga memainkan peran penting dalam menciptakan ruang bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk memperoleh akses yang setara (Salwa Andini & Yakobus Ndona, 2024), misalnya dengan mengadvokasi hak-hak perempuan, anak, difabel, dan masyarakat adat. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, perubahan sosial yang diinginkan akan sulit terwujud, karena pada akhirnya keberlanjutan keadilan sosial hanya dapat tercapai melalui kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

5. Sinergi Antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat

Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memerlukan sinergi yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga unsur ini memiliki peran masing-masing yang tak bisa dipisahkan, dan keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama hanya bisa tercapai melalui kolaborasi yang harmonis antara ketiganya. Sinergi ini berperan penting dalam memperkuat daya dukung terhadap kebijakan sosial, menciptakan kesempatan ekonomi yang merata, dan memastikan pemerataan akses terhadap berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Peran Pemerintah dalam Sinergi Pemerintah, sebagai aktor utama dalam penetapan kebijakan, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kerangka regulasi yang mendorong terciptanya keadilan sosial. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada sebagian golongan atau individu, melainkan mendukung semua lapisan masyarakat (Khairul Wahid et al., 2023), termasuk mereka yang kurang beruntung. Pemerintah juga

berperan dalam menyediakan dana dan sumber daya untuk program-program sosial yang ditujukan kepada masyarakat miskin, rentan, atau terpinggirkan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang mendukung kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat.

Peran Swasta dalam Sinergi

Sektor swasta memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian negara. Dalam hal keadilan sosial, sektor swasta dapat berperan sebagai mitra dalam program-program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat (Latief, 2016). Misalnya, melalui corporate social responsibility (CSR), perusahaan dapat menyediakan dana atau infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan, atau pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang membutuhkan. CSR juga dapat diarahkan untuk mendukung program-program yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Swasta, selain berfokus pada keuntungan, juga harus memiliki tanggung jawab sosial untuk berinvestasi dalam pengembangan masyarakat. Investasi dalam sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan (Praatiwi et al., 2024), sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial.

Peran Masyarakat dalam Sinergi

Masyarakat, sebagai penerima manfaat dari kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah dan sektor swasta, memainkan peran yang tak kalah penting. Masyarakat bertindak sebagai pihak yang mengimplementasikan kebijakan atau program tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga berfungsi sebagai agen kontrol sosial yang

dapat mengawasi jalannya kebijakan agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Masyarakat berperan aktif dalam menyuarkan kebutuhan mereka kepada pemerintah dan sektor swasta. Melalui organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan gerakan sosial, masyarakat dapat mengadvokasi kepentingan kelompok yang terpinggirkan atau yang kurang diperhatikan oleh kebijakan public (Padilah et al., 2023). Partisipasi masyarakat ini juga bisa mempercepat penyebaran informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, sehingga setiap warga negara dapat memanfaatkannya.

Sinergi yang Efektif: Membangun Keberlanjutan Sosial

Untuk menciptakan sinergi yang efektif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, diperlukan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antar pihak. Pemerintah perlu mendengar aspirasi masyarakat dan bekerja sama dengan sektor swasta untuk merancang kebijakan yang tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu pula, sektor swasta perlu memperhatikan tanggung jawab sosialnya dan berkomitmen untuk mendukung program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Contoh yang dapat dijadikan acuan adalah program-program kolaboratif antara pemerintah dan perusahaan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi kelompok miskin atau terisolasi. Kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, seperti rumah sakit, sekolah, dan jalan, akan mempercepat pemerataan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan adanya sinergi yang baik, diharapkan dapat tercipta keberlanjutan dalam mewujudkan keadilan sosial. Pencapaian yang lebih baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya akan tercapai dengan adanya kerjasama yang saling

mendukung dan komitmen bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

6. Pentingnya Konsistensi dalam Penerapan Nilai Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya sekadar simbol atau dokumen formal, tetapi merupakan panduan hidup yang harus diterapkan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan landasan moral dan etika yang mengatur interaksi antar individu, kelompok, dan negara. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan negara yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia (Irbah et al., 2024).

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Pancasila mengandung lima sila yang mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Setiap sila ini memberikan arahan yang jelas dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, yang diharapkan dapat diwujudkan dalam tindakan sehari-hari.

SIMPULAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peran yang sangat penting dalam membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan, harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh elemen bangsa, baik oleh pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Konsistensi dalam penerapan Pancasila akan memastikan tercapainya tujuan negara, yaitu menciptakan

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila sangat besar, seperti adanya kepentingan yang bertentangan dan polarisasi sosial yang bisa mengancam persatuan. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga agar prinsip-prinsip Pancasila tetap terjaga dalam setiap kebijakan dan tindakan. Melalui pendidikan Pancasila yang berkelanjutan, pengawasan terhadap kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dan berperan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, konsistensi dalam penerapan Pancasila adalah kunci untuk mencapai cita-cita nasional dan memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur yang benar menuju keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasi, A. (2023). Peran Pemerintah dalam Pengetasan Kemiskinan di Kota Medan. Seminar Nasional Lppm Ummat, 2(April), 247-252.
- Aminullah, A. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Serta Tantangan Dan Solusinya. JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala, 8(2), 408-423.
<https://doi.org/10.58258/jupe.v8i2.5366>
- Anggriani, R. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia Di Kawasan Asia Tenggara (Dalam Perspektif Hukum Ham Internasional). Yuridika, 32(2),308. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4773>
- Annisa, H., & Najicha, F. U. (2021). Jurnal Global Citizen Wawasan Nusantara Dalam Memcahkan Konflik Kebudayaan Nasional. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 2, 40-48.
<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/>
<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/...>
- Berdame, N. R., Sondakh, J., & Vecky. (2024). ... Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Yang Kurang Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Lex Privatum, 13(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56925%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/56925/46995>
- Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 9(3), 195-203.
<https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757>
- Destiani, C., Lumba, A. F., Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, & Mutiara Dewi, R. A. R. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. Jurnal Pengabdian West Science, 2(6), 427-441.
<https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412>
- Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. P. (2020). Permasalahan Dan Solusi Program Indonesia Pintar Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Bengkayang. Sebatik, 24(2), 307-314.

<https://doi.org/10.46984/sebatik.v2i2.1137>

- Fajar, I. (2021). Kesenjangan Digital Tingkat Ketiga pada Pemuda Pedesaan di Kabupaten Cianjur, Indonesia Third Level Digital Divide among Rural Young People in Cianjur Regency Indonesia. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 44, 44-54. <https://doi.org/10.31504/komunika.v9i1.4260>
- Hasim, H., Arifin, Y. Y., Andrianto, D., & Faridah, D. N. (2019). Ekstrak Etanol Daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi*) sebagai Antioksidan dan Antiinflamasi. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 8(3), 86. <https://doi.org/10.17728/jatp.4201>
- Irbah, J. H., Sari, I. V., Tasya, N., & Kuswanto, P. (2024). Kedudukan Dan Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Negara. 4(1), 651-657.
- Khairul Wahid, Binti Mutafarida, & Andriani. (2023). Analisis Komparatif Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin Dan Adiwarman Azwar Karim. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 2(1), 50-63. <https://doi.org/10.58355/organize.v2i1.6>
- Khoirudin, A. A. (2024). KEWAJIBAN PEMERINTAH UNTUK MENYEDIAKAN PENDIDIKAN BERBASIS KEADILAN SOSIAL BAGI WARGA NEGARANYA. *Cendekia Pendidikan*, 4(4), 50-54.
- Latief, H. (2016). Filantropi Dan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(1), 123. <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.540>
- Luthfi, M. (2019). EFEKTIFITAS BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (Studi Kasus di DesaMargajaya Kecamatan Ngamprah KBB). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(1),81. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i1.2442>